

JURIDICAL ANALYSIS FUNCTIONS AND ROLE IN THE FORMATION OF LABOR EDUCATION IN SCHOOLS BINTARA METRO POLICE STATE POLICE JAYA

ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PERAN TENAGA PENDIDIK DALAM PEMBENTUKAN BINTARA DI SPN POLDA METRO JAYA

Heri Sutanto*, Dadang Suprijatna, Nurwati*****

heri.sutanto@unida.ac.id

(Diterima pada: 01-12-2019 dan dipublikasikan pada: 01-03-2020)

ABSTRACT

Police efforts in achieving the educational goals has not come true as well. Jakarta Police SPN even further behind the other Police-Police found in Indonesia. Indicators not maximal achievement of educational goals Police use them visible on the lower end of the exam results Education and Formation (Diktuk) Police Officer Polda Metro Jaya on the NES. The role of educators is expected to print the candidates NCO Professional Police so that they can run their police duties properly in accordance with the ethics of the police which is based on the Tribrata. The method used in this research is the method of juridical sociological (empirical). The establishment of the Police Officer Education is an education to establish and equip students to be members of the police who have the knowledge, skills, abilities, commendable attitude and behavior in the context of carrying out police duties that come from the general public with the lowest level of high school graduates who have passed the various required tests such as administration and others.

Keywords: Function, Role, Educators

ABSTRAK

Usaha pencapaian tujuan pendidikan Kepolisian belumlah terwujud secara baik. Bahkan SPN Polda Metro Jaya semakin tertinggal dengan Polda-Polda lainnya yang terdapat di Indonesia. Indikator belum maksimalnya pencapaian tujuan pendidikan Kepolisian tersebut diantaranya terlihat pada rendahnya hasil ujian Akhir Pendidikan dan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri di SPN Polda Metro jaya. Peran tenaga pendidik diharapkan mampu mencetak calon-calon Bintara Polri yang profesional sehingga mampu menjalankan tugas kepolisian dengan baik sesuai dengan etika kepolisian yang berlandaskan kepada Tribrata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode yuridis sosiologis (empiris). Pendidikan Pembentukan Bintara Polri merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang berasal dari masyarakat umum dengan serendah-rendahnya lulusan SMU sederajatnya yang telah lulus dari berbagai tes yang diharuskan seperti administrasi dan lainnya.

Kata Kunci : Fungsi, Peran, dan Tenaga Pendidik

* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor

** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor

*** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor

A. Pendahuluan

Polri yang memiliki tugas pokok sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian perlu memahami nilai-nilai yang hidup di lingkungannya untuk dapat dikembangkan dalam pencapaian tugas pokok Polri secara profesional, khususnya menegakkan hukum dan melayani masyarakat.

Polri sebagai subsistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri seperti dicanangkan dalam *grand strategy* Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).¹

Citra polisi ditentukan bukan hanya oleh cara-cara mengatasi masalah, tetapi juga bagaimana sikap pribadi kepelayanan yang ditunjukkannya, antusiasme, keseriusan, kerendahan hati, semangat dan kejujurannya. Bahkan keberadaannya nyata polisi di jalanan dan lapangan secara terus menerus terlihat oleh masyarakat yang telah memberikan arti pencitraan sendiri.²

Kebutuhan dan keberadaan Polisi di tengah masyarakat merupakan kebutuhan yang mutlak dan harus ada. Polri sebagai institusi yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kondisi masyarakat yang sangat kompleks dan beragam menjadi

peluang munculnya berbagai macam persoalan masyarakat.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan personel Polri khususnya yang berpangkat Brigadir, Kepolisian melaksanakan proses seleksi Brigadir Polri bertahap oleh Kapolri. Pada pelaksanaan seleksi tersebut, Kapolri mendeliskasikan kewenangan kepada Kapolda dan jajaran melalui seleksi penerimaan Brigadir Polri yang dilaksanakan masing-masing Kepolisian Daerah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar rasio jumlah personel Polri sesuai dengan DSP (Daftar Susunan Personel) Polri. Pelaksanaan seleksi penerimaan Brigadir Polri tersebut disesuaikan dengan anggaran yang ada.³

Dalam menciptakan sumber daya Polri yang arif, bijaksana, bermoral, profesional, dan mandiri semuanya dimulai dari proses pendidikan dan pelatihan yang didapat. Oleh karena itu tubuh kepolisian perlu melakukan pembenahan salah satunya dengan mengedepankan Diklat Kepolisian.

Oleh karena itu pemerintah telah melakukan usaha peningkatan sektor pendidikan pada umumnya dan pendidikan dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya. Dalam menjalankan fungsinya, Polri dapat menghasilkan sesuatu yang optimal apabila kualitas dan kuantitas Polri tercukupi. Kualitas Polri dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.⁴

Pendidikan merupakan aspek yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, oleh sebab itu pendidikan sangat menentukan dan menunjukkan kemajuan suatu bangsa. Indonesia salah satu negara yang sedang

¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006, Hlm. 3

² S.A Soehardi, *Polisi dan Kepemimpinan*, PD PP Polri Jawa Tengah, Semarang, 2010, Hlm. 225

³ A. Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta, 2007, Hlm. 23

⁴ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 31

berkembang masih mempunyai banyak masalah yang beraneka ragam. Oleh karena itu pemerintah telah melakukan usaha peningkatan pada sektor pendidikan pada umumnya dan pendidikan dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya. Dalam menjalankan fungsinya, Polri dapat menghasilkan sesuatu yang optimal apabila kualitas dan kuantitas Polri tercukupi. Kualitas Polri dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.⁵

Pendidikan merupakan aspek yang tidak terlepas dari kehidupan manusia oleh sebab itu pendidikan sangat menentukan dan menunjukkan kemajuan suatu bangsa. Dengan kata lain dapat diungkapkan jika suatu negara tersebut sudah maju, maka pendidikan di negara tersebut juga sudah maju. Sebaliknya jika negara tersebut sedang berkembang maka pendidikan di negara tersebut juga sedang berkembang.⁶

Pada dasarnya pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi peserta didik dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan yang ada sehingga keberhasilan pelaksanaan pendidikan ditentukan juga oleh ketersediaan komponen yang ada dan standar komponen pendidikan yang mempunyai standar khusus terhadap pelaksanaan pendidikan Polri sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan dilaksanakannya pendidikan yang berbasis kompetensi diharapkan akan dapat mencetak hasil didik yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.⁷

Demi menuntut serta menciptakan seorang anggota Kepolisian yang berkomitmen tinggi, profesional dan berintelektual sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 13 ayat (1, 2, dan 3) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka dibukalah wadah pembekalan bagi anggota-anggota Kepolisian Republik Indonesia yang salah satunya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN).⁸

Sekolah Polisi Negara (SPN) yang merupakan sebagai wadah atau lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer yang baik. Yaitu dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang akan berpengaruh besar dalam diri Polri.

Program pendidikan Polri yang ada di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya salah satunya adalah Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri. Pendidikan Pembentukan (Diktuk) merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu.⁹

Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 ayat (5) Perkap No. 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian yang berbunyi : Tenaga Kependidikan di lingkungan

⁵ <http://www.metrobatam.com> diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 22.00 WIB

⁶ <http://www.polri.go.id> diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 19.00 WIB

⁷ Agus Dwiyanto, *Op.Cit*, Hlm. 83

⁸ Markus Gunawan dkk, *Buku pintar calon anggota dan anggota Polri*, Visi Media Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm. 36

⁹ Edy Sunarno, *Berkualitas, Profesional, Proporsional: Membangun SDM Polri Masa Depan*, Pensil, Jakarta, 2010, Hlm. 52

Pendidikan Polri, terdiri dari : a) Kepala Satuan Pendidikan; b) Wakil Kepala; c) Pejabat yang menangani bidang Pengajaran dan Pelatihan (Jarlal)/Diklat; d) Pejabat yang menangani bidang kesiswaan/peserta didik; e) Pejabat yang menangani bidang pendidik; f) Pejabat yang menangani bidang administrasi; g) Laboran; h) Pustakawan; i) Teknisi media pembelajaran; dan j) Sebutan tenaga kependidikan lainnya.¹⁰

Usaha pencapaian tujuan pendidikan Kepolisian tersebut belumlah terwujud secara baik. Bahkan SPN Polda Metro Jaya semakin tertinggal dengan Polda-Polda lainnya yang terdapat di Indonesia. Indikator belum maksimalnya pencapaian tujuan pendidikan Kepolisian tersebut diantaranya terlihat pada rendahnya hasil ujian Akhir Pendidikan dan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri di SPN Polda Metro jaya.

Hal ini dapat diketahui dari peringkat Sekolah/Pusdik/SPN yang ada di Indonesia, dimana peringkat SPN Polda Metro Jaya dapat di lihat pada tabel daftar hasil ujian Penilaian Secara Nasional (PSN) Diktuk Bintara Polri Tahun 2017/2018 berikut ini :

Tabel 1
Hasil Ujian Penilaian Secara Nasional (PSN)
Tahun 2017/2018

NO	SEKOLAH/PUSDIK/ SPN POLDA	NILAI RATA- RATA	JUMLAH SISWA
1.	Polda Lampung	78,97	231
2.	Polda Jatim	76,95	710
3.	Polda Bali	76,88	223
4.	Polda Sulsel	75,21	600
5.	Sepolwan	73,25	499
6.	Polda Jabar	72,33	650
7.	Polda Babel	71,34	247
8.	Polda Bengkulu	70,47	146
9.	Pusdik Binmas	70,44	150
10.	Polda Kepri	70,08	227
11.	Pusdik Gasum	69,62	200

¹⁰Lemdiklat Polri, *Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri*, Jakarta, 2016, Hlm. 11

12.	Polda NTB	68,88	145
13.	Polda Kalteng	68,35	164
14.	Polda Riau	67,33	240
15.	Polda Jateng	66,13	748
16.	Polda NTT	65,91	202
17.	Polda Sumbar	65,82	267
18.	Polda DIY	65,71	196
19.	Polda Aceh	65,64	284
20.	Polda Jambi	65,31	159
21.	Polda Kalsel	64,71	213
22.	Polda Kalbar	63,91	224
23.	Polda Metro Jaya	63,23	503
24.	Polda Banten	62,49	285
25.	Polda Sumut	62,20	261
26.	Polda Kaltim	61,10	187
27.	Polda Sultra	61,02	166
28.	Polda Sumsel	60,44	252
29.	Polda Papua	59,31	152
30.	Polda Sulteng	59,03	192
31.	Polda Sulut	57,90	188
32.	Polda Maluku	56,86	154

Sumber : Biro Jianbang Lemdiklat Polri 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa SPN Polda Metro Jaya berada pada peringkat 23 dari 32 Sekolah/Pusdik/SPN Polda yang ada di Indonesia, ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan dan pembentukan Bintara Polri di SPN Polda Metro Jaya masih memiliki hambatan dalam pelaksanaannya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup : lingkungan alam dan sosial, serta instrumental seperti kurikulum, program, sarana, fasilitas dan tenaga pendidik (instruktur). Sementara faktor internalnya yaitu : mencakup fisik dan psikologi seperti minat, inteligensi, tingkat emosi, bakat, motivasi, kepercayaan diri dan kemampuan kognitif.¹¹

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak lembaga pendidikan Kepolisian untuk dapat meningkatkan mutu pendidikannya, salah satunya adalah dalam hal merekrut Calon Bintara Polri telah dilakukan tes

¹¹N.K Roestiyah, *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm. 74

psikologi yaitu pengukuran tingkat intelegensi (IQ) calon siswa

Proses belajar mengajar pada Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri diajarkan oleh Tenaga Pendidik (Gadik) dan Instruktur menggunakan komunikasi instruksional. Tenaga Pendidik (Gadik) merupakan pengajar yang bertanggung jawab dalam pemberian pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri, sedangkan Instruktur sama dengan Tenaga Pendidik (Gadik) akan tetapi Instruktur bertanggung jawab pada proses pembelajaran di lapangan.¹²

Untuk dapat mencapai proses pendidikan yang berbasis kompetensi diperlukan adanya profil Polri, kerangka kurikulum induk pendidikan Polri, ketersediaan terhadap kurikulum, proses pembelajaran, proses evaluasi dan tentu saja harus didukung dengan adanya tenaga pendidik (Gadik) yang memadai dan mumpuni. Dalam proses pembelajaran pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan Polri komponen pendidikan sangat diperlukan, dan sesuai Peraturan KaPolri No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.¹³

Komunikasi instruksional merupakan komunikasi pendidikan yang digunakan pendidik untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi kelulusan.¹⁴

Peran seorang Tenaga pendidik di Lembaga pendidikan kepolisian memiliki tugas seperti merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan dan penelitian dalam bidangnya sehingga para tenaga pendidik mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk melahirkan insan Bhayangkara yang profesional, mandiri, dan bermoral.¹⁵

Dalam Psikologi Pendidikan, tenaga pendidik berperan dalam memberi dukungan emosional dan kognitif, memberi materi yang berarti dan menarik untuk dipelajari dan dikuasai, dan memberi dukungan yang cukup bagi terciptanya kemandirian dan inisiatif siswa.¹⁶

Peran tenaga pendidik dalam pendidikan Bintara Polri menjadi sangat signifikan, karena tenaga pendidik yang memberikan pengajaran dan mengubah seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi "siapa-siapa". Dalam arti, tenaga pendidik mampu merubah orang biasa seperti siswa lulusan sekolah menengah atas menjadi seorang yang berpengaruh di masyarakat, yaitu seorang Bintara Polri yang dengan hanya menggerakkan tangan ke atas, semua kendaraan yang melintas akan berhenti seketika.

Membentuk siswa Bintara Polri dari masyarakat sipil menjadi seorang anggota Polri bukanlah hal yang mudah, apalagi para siswa merupakan lulusan SLTA yang sedikit banyak masih memiliki pemikiran untuk bermain-main dan bebas. Pendidik (Tenaga pendidik dan instruktur) sering menjumpai hambatan-hambatan yang dapat mengganggu siswa dalam pemahaman serta fokus untuk

¹²Wikdjatmika, *Dibawah Panji-Panji Tribrata*, Cet Kedua. PTIK Press, Jakarta, 2007, Hlm. 17

¹³Edy Sunarno, *Op.Cit*, Hlm. 114

¹⁴*Ibid*, Hlm. 29

¹⁵Kunarto, *Perilaku Organisasi POLRI*, PT Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, Hlm. 83

¹⁶<http://duniapendidikan.com/> diakses pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 20.00 WIB

memperhatikan dan menerima pembelajaran.

Peran tenaga pendidik diharapkan mampu mencetak calon-calon Bintara Polri yang profesional sehingga mampu menjalankan tugas kepolisian dengan baik sesuai dengan etika kepolisian yang berlandaskan kepada Tribrata. Agar proses pendidikan di Sekolah Polisi Negara berlangsung dengan baik, tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan seperti memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, memiliki sertifikat pendidik dari Depdiknas atau Internal Polri, serta sehat jasmani dan rohani. Dalam psikologi pendidikan, seorang tenaga pendidik harus menguasai beragam perspektif dan strategi, serta harus bisa mengaplikasikannya secara fleksibel.¹⁷

Dalam pendidikan, secara implisit terjalin hubungan antara dua pihak, yaitu pihak pendidik dan pihak peserta didik dalam hubungan itu berlainan kedudukan dan peranan setiap pihak, akan tetapi sama dalam hal dayanya yaitu saling mempengaruhi guna terlaksananya proses pendidikan (transformasi pendidikan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan yang tertuju kepada tujuan-tujuan yang diinginkan).¹⁸

Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pendidikan yang menurut jalurnya merupakan jalur formal; menurut jenisnya merupakan pendidikan kedinasan; sedangkan menurut jenjangnya merupakan pendidikan tinggi.

Sebagai bentuk pendidikan tinggi kedinasan, pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia

dapat berbentuk pendidikan akademi, yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan diploma, Seperti diploma satu (D1) di SPN atau Akpol yang menyelenggarakan program pendidikan diploma tiga (D4) Ilmu kepolisian. Selain akademi, juga dapat berbentuk sekolah tinggi yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan tingkat sarjana, baik S1, S2 maupun S3.¹⁹

Pendidikan Pembentukan Bintara Polri merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang berasal dari masyarakat umum dengan serendah-rendahnya lulusan SMU sederajatnya yang telah lulus dari berbagai tes yang diharuskan seperti administrasi dan lainnya.

Ditukut Bintara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a10 Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan POLRI No: Kep/289/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum, merupakan pendidikan yang diarahkan untuk membentuk Bintara Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian, dengan pola pendidikan 2 - 4,5 - 0,5 meliputi:²⁰

- a. 2 bulan : Pembentukan Dasar Bhayangkara.
- b. 4,5 bulan : Pembekalan Profesi Kepolisian.
- c. 0,5 bulan : Pambulatan meliputi latnis, latja dan pembekalan.

¹⁷Anton Tabah, *Polisi Budaya dan Politik*, CV Sahabat, Klaten, 1996, Hlm. 53

¹⁸<http://edukasi.kompasiana.com//dasar-hukum-pendidikan-di-indonesia-.html> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018 pukul 19.10 Wib.

¹⁹Lemdiklat Polri, *Op.Cit*, Hlm. 71

²⁰Lemdiklat Polri, *Op.Cit*, Hlm. 90

Adapun metode-metode yang digunakan selama proses pendidikan Pembentukan Bintara di SPN Polda Metro Jaya yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Metode Ceramah
Dalam pelaksanaan pendidikan metode ceramah di pembelajaran Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri memerlukan keterampilan tertentu agar tidak membosankan dan dapat menarik perhatian siswa.
- 2) Metode tanya jawab
Metode tanya jawab dilakukan untuk mengevaluasi sehingga pendidik dapat mengetahui sejauhmana siswa dalam memahami pembelajaran sehingga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menanyakan hal-hal penting dan segala sesuatu kurang jelas yang ingin ditanyakan.
- 3) Metode Demonstrasi
Metode demonstrasi dalam bentuk komunikasi non verbal yang digunakan pendidik (gadik dan instruktur) dalam proses pembelajaran dimana tenaga pendidik akan mencontohkan terlebih dahulu dengan diikuti penjelasan terkait pembelajaran tersebut. Metode ini juga di dukung dengan berbagai macam alat peraga.
- 4) Metode Simulasi
Metode simulasi ini terkadang digabungkan dengan metode bermain peran (*role play*) sehingga dapat dikatakan bahwa metode simulasi dan metode bermain peran (*role play*) terkadang dilakukan bersamaan.
- 5) Metode Penggunaan Media
Penggunaan media dalam proses belajar mengajar sebagai penunjang kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Dengan media akan mempermudah proses penyampaian pesan yang dilakukan pendidik (Gadik dan Instruktur) dan juga membuat para siswa Bintara Polri cepat menangkap pembelajaran.

Penggunaan media sebagaimana dimaksud diantaranya meliputi 3 media yaitu :²¹

- a) Media visual
Media visual seperti gambar jenis-jenis senjata, cara memegang senjata, cara menggunakan tameng pada saat menghadapi masyarakat berdemo disertai dengan penjelasannya, sehingga para siswa Bintara Polri akan lebih mudah menerima konsep yang diajarkan dan kemudian melaksanakannya.
- b) Media Video
Penggunaan media video membuat para siswa Bintara Polri dapat melihat gambar yang bergerak dengan adanya suara, dimana hal ini dapat membuat pembelajaran semakin efektif dan lancar, khususnya pada mata pelajaran yang mayoritas praktek serta membuat minat dan motivasi siswa menjadi tumbuh untuk selalu memperhatikan pembelajaran, sehingga siswa lebih berkonsentrasi.
- c) Media Alat Peraga
Media ini memudahkan dalam melakukan praktik kegiatan dilapangan yang membutuhkan alat sebagai pendukungnya dan memudahkan pendidik dalam penyampaian materi dikarenakan siswa dapat langsung belajar dengan menggunakan media.²²

Kemudian Tenaga Pendidik harus memiliki kompetensi yaitu, sebagai berikut:²³

- a) Menguasai mata peiajaran yang diajarkan;
- b) Mampu merancang program pembelajaran yang meliputi mengembangkan kurikulum ke dalam silabus, mampu memilih metode pembelajaran, mampu memilih alins dan alongins serta mampu membuat persiapan pembelajaran;

²¹Lemdiklat Polri, *Op. Cit*, Hlm. 96

²²Lemdiklat Polri, *Op. Cit*, Hlm. 97

²³Lemdiklat Polri, *Op. Cit*, Hlm. 121

- c) Mampu mengembangkan bahan ajar dan media yang diperlukan;
- d) Mampu mengembangkan evaluasi hasil belajar;
- e) Mampu melaksanakan program pembelajaran meliputi menerapkan metode yang telah dipilih, menggunakan bahan ajar dan media yang dipilih, mengelola kelas, melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar serta melaksanakan administrasi kelas;
- f) Mampu melaksanakan perbaikan atau mengatasi kesulitan belajar peserta didik (remedial);
- g) Mampu melaksanakan bimbingan dan konseling;
- h) Mampu mengembangkan ilmu di bidangnya dan keterampilan mengajar; dan
- i) Mampu mencari kemampuan awal karakteristik peserta didik.

B. Fungsi dan Peran Tenaga Pendidik dalam Pembentukan Bintara di SPN Polda Metro Jaya

Pada dasarnya pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi peserta didik dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan yang ada sehingga keberhasilan pelaksanaan pendidikan ditentukan juga oleh ketersediaan komponen yang ada dan standar komponen pendidikan yang mempunyai standar khusus terhadap pelaksanaan pendidikan Polri sesuai dengan tuntutan kompetensi.

Peran Gadik dan Gadikan dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintara POLRI yaitu mengaktualisasikan rancangan pendidikan menjadi kegiatan pengelolaan belajar mengajar. Penempatan Gadik dan Gadikan diperoleh dari penunjukan kepada anggota POLRI Polda setempat. Penetapan Gadik dan Gadikan disesuaikan dengan keberadaan tenaga pendidik dengan DSPP (Daftar Susunan Personil) yang mengacu pada

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Jumlah Gadik pada SPN Polda Tipe A sebesar 35 orang, sedangkan jumlah gadik pada SPN Polda Tipe B yaitu 33 orang. Gadik dan Gadikan memegang peran penting dalam pendidikan, karena mempunyai tugas memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dengan menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan.²⁴

Untuk menciptakan calon Bintara POLRI yang berkompoten dan profesional, gadik dan gadikan harus menguasai 4 empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Gadik dan Gadikan harus sungguh-sungguh dan baik dalam menguasai empat kompetensi tersebut agar tujuan pendidikan pembentukan Bintara POLRI bisa tercapai.

Dilihat dari *Affective Domain*, hasil didik tersebut dalam melaksanakan tugasnya diharapkan akan lebih mempunyai rasa percaya diri karena telah didukung oleh kemampuan secara intelektual (*kognitif*) dan juga lebih dapat menyesuaikan diri dengan situasi tugas apapun apalagi tugas kepolisian ini berhubungan dengan masyarakat yang notabene masyarakat Indonesia sangatlah kompleks dan beragam baik suku, adat, bahasa, budaya, kebiasaan yang tersebar dari sabang sampai merauke. Berkaitan dengan *Psychomotor Domain* maka hasil didik diharapkan akan mempunyai keterampilan dalam fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya seperti keterampilan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan, keterampilan dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat,

²⁴Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, *Op.Cit*, Hlm. 78

keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok Polri.²⁵

Peran seorang Tenaga pendidik di Lembaga pendidikan kepolisian memiliki tugas seperti merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan dan penelitian dalam bidangnya sehingga para tenaga pendidik mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk melahirkan Insan Bhayangkara yang profesional, mandiri, dan bermoral. Dalam Psikologi Pendidikan, Tenaga pendidik berperan dalam memberi dukungan emosional dan kognitif, memberi materi yang berarti dan menarik untuk dipelajari dan dikuasai, dan memberi dukungan yang cukup bagi terciptanya kemandirian dan inisiatif siswa.

Peran tenaga pendidik dalam pendidikan Bintara Polri menjadi sangat signifikan, merekalah yang memberikan pengajaran dan mengubah seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi "siapa-siapa". Dalam arti, tenaga pendidik mampu merubah orang biasa seperti siswa lulusan sekolah menengah atas menjadi seorang yang berpengaruh di masyarakat, yaitu seorang Bintara Polri yang dengan hanya menggerakkan tangan ke atas, semua kendaraan yang melintas akan berhenti seketika. Bintara Polri merupakan etalase dalam institusi kepolisian Republik Indonesia karena 70% polisi yang bertugas langsung pada masyarakat adalah Bintara.²⁶

Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kalem dikpol Nomor 205/IV/2015 menjelaskan bahwa profil lulusan Bintara Polri berkualifikasi sebagai pelaksana teknis tugas umum kepolisian dan pengendalian massa. Jadi, pendidikan pembentukan Bintara

Polri menjadi sangat penting untuk diteliti karena merupakan pendidikan dasar dalam pembentukan Polri sebelum mencapai pendidikan lanjutan, sehingga kualitas Polri ini sangat bergantung pada bagaimana tenaga pendidik di SPN dalam memberikan pengajaran serta memberikan contoh teladan yang baik kepada para siswa calon Bintara Polri.

Dalam proses pembelajaran pada Diktuk dan Dikbang di lingkungan Lemdiklat Polri, diperlukan standar 10 (sepuluh) komponen pendidikan, yaitu: a) kurikulum, b) hajar, c) peserta didik, d) tenaga pendidik, e) tenaga kependidikan, f) metode, g) fasilitas pendidikan, h) alins/alongins, i) evaluasi dan j) anggaran.²⁷

Tenaga Pendidik perlu memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dilengkapi oleh sertifikasi dalam meningkatkan kemampuan mengajar. Tenaga pendidik diharapkan dapat mengimplementasikan harapan yang tertuang dalam visi Polri, undang-undang, kebijakan Kapolri, kebijakan Kalem dikpol, dan kebijakan Kapolda.

Tenaga pendidik wajib menguasai materi, kondisi peserta didik dan keberadaan peralatan penunjang sehingga peserta didik memperoleh kompetensi sesuai dengan tujuan pendidikan dan pencapaian lulusan yang profesional.

Pembentukan Bintara Polri memiliki pedoman evaluasi yang diterapkan secara kontinyu dan berkelanjutan berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan sesuai harapan Kapolri dan Kalem dikpol. Tenaga Pendidik diberikan pembinaan yang berkelanjutan oleh Kalem dikpol sebagai pembina fungsi pendidikan dan Kapolda sebagai pengguna lulusan.

Menurut Bloom dkk, Taksonomi terbagi menjadi tiga ranah yaitu ranah

²⁵*Ibid*, Hlm. 56

²⁶A Kadamanta, *Op.Cit*, Hlm. 39

²⁷Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, *Op.Cit*, Hlm. 82

Kognitif, ranah Afektif dan ranah Psikomotorik.²⁸

1. Ranah Kognitif (penalaran)

Ranah Kognitif mempunyai enam sub yang disusun mulai dengan yang paling sederhana sampai tahap yang paling kompleks dan secara singkat, yaitu:²⁹

- a. Pengetahuan (*knowledge*) yaitu kemampuan untuk mengingat bahan-bahan yang pernah dipelajari terdahulu. Kaitannya dengan fungsi dan peran tenaga pendidik di SPN Polda Metro Jaya dalam Pembentukan Bintara yaitu dengan memberikan tes atau ujian terkait dengan materi yang telah diberikan sebelumnya.
- b. Pemahaman (*compherehension*) yaitu kemampuan untuk menangkap pengertian dari sesuatu, seperti menerjemahkan sesuatu atau menafsirkan sesuatu dengan cara menjelaskan. Hal ini sesuai dengan peran tenaga pendidik dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan materi yang telah disampaikan dengan melakukan presentasi/pemaparan secara bergiliran di depan kelas.
- c. Penerapan (*application*) yaitu kemampuan untuk menggunakan bahan-bahan yang telah dipelajari dalam situasi yang baru dan kongkret atau nyata.
- d. Penguraian (*analysis*) yaitu kemampuan untuk memilah-milih sesuatu bahan pada bagian-bagian komponennya sehingga struktur bahan tersebut dapat dipahami. Peran pendidik dalam hal ini ialah seperti pada saat perawatan senjata api yang akan digunakan oleh siswa dengan menjelaskan rangkaian-rangkaian yang ada di dalamnya.
- e. Penyatuan (*synthesis*) yaitu kemampuan untuk menyatukan

bagian-bagian yang terpisah guna membangun suatu keseluruhan yang utuh. Peran Tenaga pendidik dalam hal ini yaitu dengan memberikan materi mengenai cara mengumpulkan informasi intelijen tentang suatu keadaan.

- f. Penilaian (*evaluation*) yaitu memutuskan atau menentukan nilai suatu materi untuk suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini fungsi dan peran tenaga pendidik yaitu untuk memberikan penilaian dan evaluasi dari hasil kegiatan belajar.

2. Ranah Afektif (nilai dan sikap)

Ranah Afektif ini dibagi menjadi lima level belajar yang disusun mulai dari yang paling sederhana sampai tahap yang paling kompleks dan secara singkat, yaitu:³⁰

- a. Penerimaan (*receiving*) yaitu kesediaan seseorang siswa untuk mengikuti suatu peristiwa tertentu, seperti kegiatan di dalam kelas, buku teks, musik dan lain-lain. Fungsi dan peran Tenaga pendidik di SPN Polda Metro Jaya dalam hal ini yaitu meliputi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.
- b. Pemberian Tanggapan (*responding*) yaitu menunjuk pada keikutsertaan secara aktif dari siswa agar dapat memberikan reaksi kesiapan dalam memberikan respon atau minat. Fungsi dan peran Tenaga pendidik di SPN Polda Metro Jaya yaitu dengan mengarahkan siswa calon bintara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan diluar dari kegiatan Belajar mengajar seperti ekstrakurikuler yang terdapat di sekolah-sekolah, namun di SPN Polda Metro Jaya siswa diarahkan sesuai dengan minat dan bakat yang

²⁸Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, Cet. III. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 60

²⁹*Ibid*, Hlm. 60

³⁰Hisyam Zaini, dkk, *Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi*, CTDS IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002, Hlm. 74-76

- dimiliki yaitu, kegiatan bermusik dan lain sebagainya.
- c. Penentuan Sikap (*value*) yaitu berhubungan dengan nilai yang melekat pada siswa terhadap suatu peristiwa atau tingkah laku, seperti ingin meningkatkan keterampilan kelompok.
 - d. Pengorganisasian (*organization*) yaitu menggabungkan beberapa nilai yang berbeda-beda serta membangun sistem yang konsisten secara internal.
 - e. Pembentukan Pola (*characterization by a value or a complex*) yaitu menunjuk pada proses afeksi di mana seseorang memiliki suatu sistem nilai sendiri yang mengendalikan perilakunya untuk waktu yang lama dan pada gilirannya akan membentuk gaya hidupnya.
3. Ranah Psikomotorik (keterampilan gerak fisik)
- Ranah Psikomotorik ini dibagi menjadi tujuh level belajar yang disusun mulai dari yang paling sederhana sampai tahap yang paling kompleks dan secara singkat, yaitu.³¹
- a. Persepsi (*perception*) yaitu berkenaan dengan penggunaan organ-indra untuk menangkap isyarat yang membimbing aktivitas gerak. Fungsi dan peran Tenaga pendidik di SPN Polda Metro Jaya dalam hal ini yaitu dengan memberikan pelatihan mengenai baris-berbaris, dan memimpin upacara.
 - b. Kesiapan (*set*) yaitu menunjukkan pada kesiapan untuk melakukan tindakan atau kesiapan mental dan fisik untuk bertindak. Fungsi dan peran Tenaga pendidik di SPN Polda Metro Jaya yaitu membimbing siswa untuk tetap tenang ketika menghadapi keadaan seperti penanganan unjuk rasa dll.
 - c. Gerakan Terbimbing (*guided respons*) yaitu tahapan awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks seperti peniruan.
 - d. Gerakan Terbiasa (*mechanism*) yaitu berkenaan dengan kinerja dimana respon siswa telah menjadi terbiasa dan gerakan-gerakan dengan penuh keyakinan dan kecakapan.
 - e. Gerakan Kompleks (*complex overt respons*) yaitu merupakan gerakan yang sangat terampil dengan pola-pola gerakan yang sangat kompleks. Fungsi dan peran Tenaga pendidik di SPN Polda Metro Jaya yaitu dengan mengajarkan bela diri kepada siswa calon Bintara.
 - f. Penyesuaian Pola Gerakan (*adaptation*) yaitu berkenaan dengan keterampilan yang dikembangkan dengan baik sehingga seseorang dapat memodifikasi pola-pola gerakan untuk menyesuaikan tuntutan tertentu atau menyesuaikan situasi tertentu.
 - g. Kreativitas (*organitation*) yaitu menunjuk kepada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk menyesuaikan situasi tertentu atau problem khusus.

C. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pendidikan Pembentukan Bintara di SPN Polda Metro Jaya

Rendahnya kinerja tenaga pendidik tidak terlepas dari kompetensi tenaga pendidik. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang merupakan kombinasi dari pengetahuan keterampilan dan sikap yang ditunjukkan dalam melaksanakan kerja sesuai dengan standar yang diharapkan dalam suatu pekerjaan.³²

³¹ Harjanto, *Op.Cit*, Hlm. 61

³²Ilham, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pusaka Alamaida, Makassar, 2015, Hlm. 115

Terdapat beberapa permasalahan menyangkut sistem organisasi dan kelembagaan Polri yaitu belum efektifnya pengelolaan yang komprehensif di lembaga-lembaga pendidikan Polri, tidak terkecuali Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya. Pendidikan yang diselenggarakan mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk sumber daya manusia yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu seperti komunikasi, negosiasi sehingga akan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bertujuan untuk melengkapi sumber daya manusia Polri dengan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan tingkah laku (*attitude*) yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan tugas di lapangan.

Pendidikan pengembangan tenaga pendidik (Gadik) melalui pendidikan pengembangan/Kejuruan Gadik dan Akta mengajar merupakan salah satu program pendidikan khusus yang lebih khusus lagi dalam upaya peningkatan kualitas/Kompetensi Gadik menuju kearah yang lebih baik, melalui pendidikan Akta mengajar dengan tujuan bahwa Gadik Polri memiliki kemampuan mengajar/mendidik yang memiliki kompetensi setara dengan pengajar baik guru maupun dosen yang sesuai tuntutan Sistem Pendidikan Nasional.³³

Seperti diketahui bahwa menjadi seorang Gadik/pendidik bukanlah sebuah hal yang dicita-citakan oleh setiap Personil Polri, seperti halnya secara umum bahwa tidak banyak anak yang karena minatnya untuk bercita-cita menjadi seorang guru, namun apabila melihat akan pentingnya sebuah perubahan kearah Polri yang lebih baik, harus diawali dengan pembentukan personil Polri yang didukung oleh profesionalisme seorang Gadik, sebagai tenaga-tenaga

pencetak insan Bhayangkara yang dituntut profesional dalam melaksanakan tugas dilapangan. Jika menyadari hal ini maka sesuai dengan penyebutan bahwa Gadik/Guru merupakan profesi dimana profesi harus didasari dengan sebuah panggilan jiwa, keikhlasan dengan kesadaran yang tinggi, maka kita tidak akan ragu untuk menyadari bahwa menjadi seorang Gadik merupakan tugas mulia yang tidak berbeda dengan tugas menjadi Polisi di fungsi kepolisian yang lainnya.³⁴

Masalah utamanya ialah rentang waktu yang diberikan tidak sebanding dengan program yang ada, dan hasil yang diharapkan cenderung lebih tinggi, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut maka cita-cita Polri menuju kearah yang professional akan sulit dicapai, di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya sendiri masih banyak permasalahan-permasalahan yang menjadi tradisi setiap tahunnya.

Norma dan kebiasaan yang telah diterapkan sebelumnya oleh para siswa Bintara Polri sangat berbeda dengan norma serta nilai-nilai yang ada di Kepolisian, hal ini membuat siswa menjadi kesulitan dalam menjalani pembelajaran di awal pendidikan. Selain itu segi ketahanan fisik atau jasmani dari siswa Bintara Polri dalam menjalani masa pendidikan yang memiliki kegiatan yang sangat padat dengan kedisiplinan yang sangat kuat menjadi hambatan yang terjadi pada komunikasi atau peserta didik.

D. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pendidikan Pembentukan Bintara di SPN Polda Metro Jaya

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan pembentukan Bintara di SPN Polda

³³Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, *Op.Cit*, Hlm. 56

³⁴Harsja W Bachtiar, *Op.Cit*, Hlm. 34

Metro Jaya maka dilakukan berbagai upaya, diantaranya yaitu, membuat rancangan konsep aktual, hal ini merupakan hasil analisis dan pembahasan yang berisikan kajian terhadap temuan-temuan lapangan.

Untuk menjawab tantangan ini dibutuhkan Tenaga Pendidik yang lebih profesional dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai macam program yang ada serta mampu menciptakan siswa didik yang mampu menjawab tantangan di masa depan untuk menjadi mitra masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Sebagai alternatif dalam mengimplementasikan kebijakan manajemen pendidikan pembentukan Bintara Polri yang mampu menyiapkan lulusan yang profesional ditinjau dari efektivitas efisiensi penyelenggaraan pendidikan Polri oleh SPN, melalui rasional komponen pendidikan, rancangan konsep, implementasi rancangan dan evaluasi rancangan.

Rancangan konsep aktual manajemen pendidikan pembentukan Bintara Polri merupakan pendidikan dalam membentuk peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian.

Penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintara Polri dilakukan dengan menerapkan nilai Tribarata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja Polri. Nilai-Nilai Tribarata berorientasi pada sendi-sendi Pancasila sebagai ideologi negara, sedangkan perumusan nilai-nilai Catur Prasetya lebih kongkrit dan sudah tertampung dalam nilai-nilai Tribarata.³⁵

Implementasi rancangan konsep aktual manajemen pendidikan

pembentukan Bintara Polri memerlukan beberapa kriteria agar penerapannya dapat dilaksanakan oleh SPN secara umum, yaitu:³⁶

1. Program pendidikan pembentukan Bintara Polri berbasis kompetensi yang berorientasi pada Sistem Pendidikan Polri yang bersumber dari Sistem Pendidikan Nasional.
2. Tenaga pendidik perlu memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dilengkapi oleh sertifikasi dalam meningkatkan kemampuan untuk mengajar.
3. Pengembangan kurikulum dalam pendidikan pembentukan Bintara Polri dilakukan bersinergi dengan melibatkan pihak terkait dan pengguna khususnya Kapolres atau Kapolsek Type A untuk menghasilkan rancangan kurikulum yang sesuai kondisi tugas di lapangan.
4. Bahan Ajar dalam bentuk modul harus memiliki muatan lokal agar kompetensi dan profesionalitas lulusan Bintara Polri dapat sesuai dengan kondisi kewilayahan.
5. Proses rekrutmen calon Bintara Polri dilakukan oleh Panitia Daerah dengan melibatkan pihak SPN dalam menentukan kelulusan rekrutmen peserta didik.
6. Keberadaan fasilitas pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan pendidikan yang berkesesuaian dengan jumlah peserta didiknya.
7. Alins dan Alongins Jumlah alin dan alongins sebagai sarana pendukung dalam proses belajar mengajar perlu disesuaikan dengan kurikulum dan jumlah peserta didik.
8. Gadikan sebagai tenaga struktural harus fokus menjalankan pekerjaan sesuai tupoksi dan memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan kompetensinya, serta dituntut untuk inovatif dalam penerapan dan

³⁵Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, *Op.Cit*, Hlm. 66

³⁶Lemdiklat Polri, *Op.Cit*, Hlm. 177

pemilihan metode pembelajaran yang tepat terhadap peserta didik.³⁷

9. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan mulai dari sebelum penyelenggaraan pendidikan dimulai, pada saat proses belajar mengajar, pada akhir pendidikan dan setelah peserta didik ditempatkan bertugas di kewilayahan. Diperlukan kesiapan ketersediaan anggaran dari APBN dalam rangka menunjang peningkatan kompetensi dan profesional Bintara Polri, yang pencairannya diterima sebelum penyelenggaraan pendidikan dimulai.

E. Kesimpulan

1. Fungsi dan Peran Tenaga Pendidik dalam Pembentukan Bintara di SPN Polda Metro Jaya sudah berjalan efektif dan sesuai dengan Peraturan Kalem dikpol No. 02 Tahun 2009 tentang Penunjukan Tenaga Pendidik. Tenaga pendidik di SPN Polda Metro Jaya berperan dalam memberi dukungan emosional dan kognitif, kemudian memberi materi yang berarti juga menarik untuk dipelajari dan dikuasai oleh para siswa, serta memberi dukungan yang cukup bagi terciptanya kemandirian dan inisiatif siswa. Hal ini sudah dilakukan dengan baik oleh Tenaga Pendidik di Lingkungan SPN Polda Metro Jaya. Kemudian peran seorang Tenaga pendidik di Lembaga pendidikan kepolisian khususnya di SPN Polda Metro Jaya yaitu, memiliki tugas seperti merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan dan penelitian dalam bidangnya sehingga para tenaga pendidik mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk melahirkan Insan Bhayangkara

yang profesional, mandiri, dan bermoral.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembentukn Bintara di SPN Polda Metro Jaya yaitu, rentang waktu yang diberikan tidak sebanding dengan program yang ada, dan hasil yang diharapkan. Norma dan kebiasaan yang telah diterapkan sebelumnya oleh para siswa Bintara Polri sangat berbeda dengan norma serta nilai-nilai yang ada di Kepolisian, hal ini membuat siswa menjadi kesulitan dalam menjalani pembelajaran di awal pendidikan
3. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dan pembentukan Bintara di SPN Polda Metro Jaya maka dilakukan berbagai upaya, diantaranya yaitu, membuat rancangan konsep aktual, hal ini merupakan hasil analisis dan pembahasan yang berisikan kajian terhadap temuan-temuan lapangan dalam melakukan penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintara Polri yang dilakukan dengan menerapkan nilai Tribarata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja Polri. Nilai-Nilai Tribarata berorientasi pada sendi-sendi Pancasila sebagai ideologi negara, sedangkan perumusan nilai-nilai Catur Prasetya lebih kongkrit dan sudah tertampung dalam nilai-nilai Tribarata.

³⁷Lemdiklat Polri, *Op.Cit*, Hlm. 179

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2006
- Anton Tabah, *Polisi Budaya dan Politik*, CV Sahabat, Klaten, 1996
- A Kadamanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta, 2007
- Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, Cet. III. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Hisyam Zaini, dkk, *Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi*, CTDS IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002
- Ilham, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pusaka Alamaida, Makassar, 2015
- Kunarto, *Perilaku Organisasi POLRI*, PT Cipta Manunggal, Jakarta, 1997
- Markus Gunawan dkk, *Buku pintar calon anggota dan anggota Polri*, Visi Media Pustaka, Jakarta, 2009
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994
- N.K Roestiyah, *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Sunarno, *Berkualitas, Profesional, Proporsional: Membangun SDM Polri Masa Depan*, Pencil, Jakarta, 2010
- Wikdjatmika, *Dibawah Panji-Panji Tribrata*, Cet Kedua. PTIK Press, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Kapolri No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Polri
- Peraturan Kapolri No. 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara (SPN)
- Peraturan Kapolri No. 04 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Polri
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian
- Peraturan Kalemdikpol No. 02 Tahun 2009 tentang Penunjukkan Tenaga Pendidik
- Peraturan Kalemdikpol No. 05 Tahun 2009 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan POLRI
- Peraturan Kalemdikpol No. 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penilaian Peserta Didik
- Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan POLRI No: Kep/289/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum

C. Artikel, Jurnal dan Majalah:

- Lemdiklat Polri, *Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri*, Jakarta, 2016
- S.A Soehardi, *Polisi dan Kepemimpinan*, PD PP Polri Jawa Tengah, Semarang, 2010

D. Sumber Elektronik :

- <http://duniapendidikan.com/>
- <http://edukasi.kompasiana.com/dasar-hukum-pendidikan-di-indonesia-html>.
- <http://www.metrobatam.com>
- <http://www.polri.go.id>